



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis penyelenggaraan pembangunan bidang cipta karya, perumahan, dan kawasan permukiman selama periode lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan, perkembangan permasalahan pembangunan, serta tantangan masa depan yang meliputi pertumbuhan penduduk, kebutuhan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga dapat mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Gresik.

1.2 Dasar hukum penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik
14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah. Berpijak dari maksud

tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkatdaerah.

1.4 Sistematika penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Hasil perumusan RPJMD disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategis, Dan Arah Kebijakan
- 3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029
- 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029
- 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 4.7 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD
- 4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

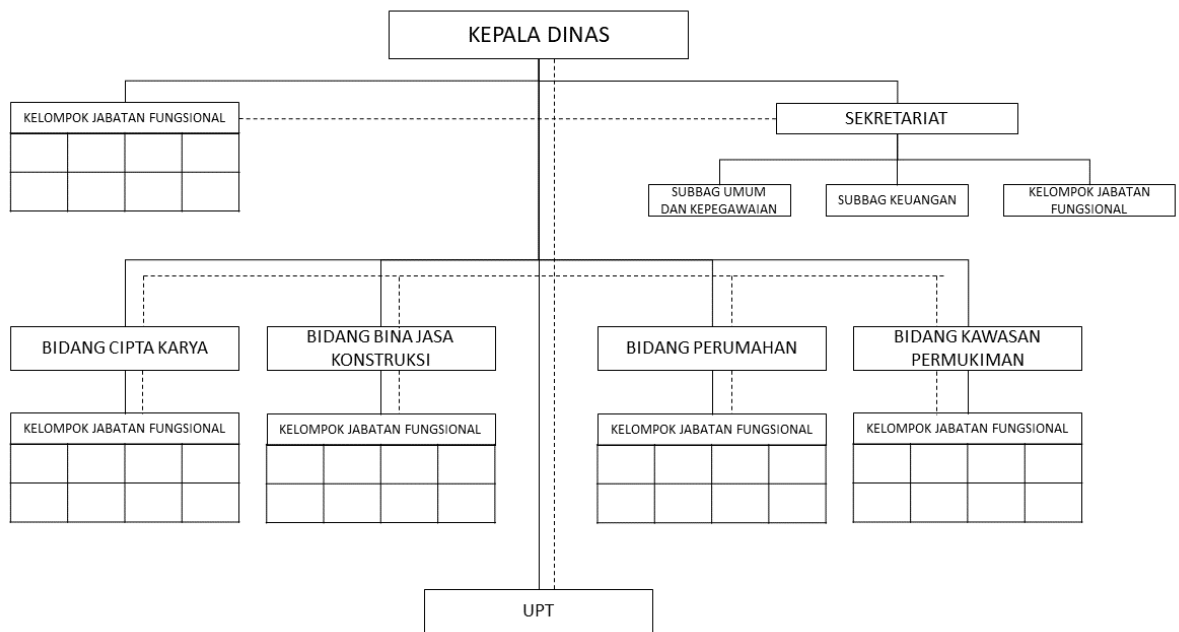
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah menggambarkan kondisi umum penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang cipta karya, perumahan, dan kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Subbab ini memuat deskripsi menyeluruh mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, capaian kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, kerja sama dengan pihak lain, serta dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Penyajian gambaran pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman utuh mengenai kapasitas dan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat, termasuk penyediaan hunian layak, pengelolaan kawasan permukiman, penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan, serta pengembangan infrastruktur lingkungan yang berkelanjutan. Gambaran ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan, isu strategis, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk periode 2025–2029.

2.1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang cipta karya, perumahan, dan kawasan permukiman. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi dinas dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman; dan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Di Lingkungan Dinas;
2. Pelayanan Administrasi Umum, Ketatausahaan, Kearsipan Dan Dokumentasi Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas;
3. Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Urusan Kepegawaian;
4. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan Dan Inventaris Kantor;
5. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas;
6. Pengkoordinasian Bidang Di Lingkup Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
7. Pengkoordinasian Dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Program Dan Kegiatan; Dan
8. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;

- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Subbagian Keuangan; mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
 - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
 - g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan perumahan dan kawasan permukiman di bidang perumahan. Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perumahan, menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- 3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;

4. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
5. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang Perumahan;
7. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang Perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

D. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Bidang Kawasan Permukiman. Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di Bidang Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di Bidang Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di Bidang Kawasan Permukiman;
5. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman;
6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di Bidang Kawasan Permukiman;
7. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di Bidang Kawasan Permukiman; dan

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang cipta karya. Bidang Cipta Karya, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kegiatan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang cipta karya;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang cipta karya;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang cipta karya;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang cipta karya;
5. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang cipta karya;
6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang cipta karya;
7. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang cipta karya; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Bina Jasa Konstruksi

Bidang Bina Jasa Konstruksi, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang bina jasa konstruksi. Bidang Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang jasa konstruksi;

2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang jasa konstruksi;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang jasa konstruksi;
5. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang jasa konstruksi;
7. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di bidang jasa konstruksi;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Dinas Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, dan NON PNS. Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 170 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Data Pegawai Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PNS	82
2	PPPK	23
3	NON PNS	65
	JUMLAH	170

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik mencerminkan tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode lima tahun terakhir. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan berdasarkan sasaran dan target Renstra periode sebelumnya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator pembangunan lain yang relevan, termasuk indikator SDGs yang telah diratifikasi pemerintah. Rincian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Tujan	Sasaran	IKD	IKKLPD	SPM	Base line	Target Tahun				Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan		✓					40.53 %	42.20 %	43.91 %	45.20 %	40.30 %	41.80 %	43.27 %	44.34 %	99.4 4%	99.07 %	98.5 5%	98.0 9%	Meningkatnya Pelayanan infrastruktur sanitasi layak dan aman
2	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana										100%				100%				100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	Jumlah layanan pengelolaan limbah cair domestik										1 Layanan				1 Layanan				100 %	Peningkatan Pelayanan BLUD
4	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan										1 Unit				1 Unit				100 %	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
5	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman					✓		53.99 %	55.20 %	56.36 %	57.48 %	51.23 %	52.12 %	54.62 %	56.93 %	94.8 7%	95.5 %	96.9 %	99.0 6%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
6	Jumlah sarana prasarana IPAL dan IPLT yang dipelihara					✓			135 Unit	463 Unit	135 Unit		135 Unit	463 Unit	135 Unit		100%	100 %	100 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
7	Jumlah Sistem Pengelolaan Air					✓			135 Unit	463 Unit	135 Unit		135 Unit	463 Unit	135 Unit		100%	100 %	100 %	Operasi dan Pemeliharaan

No	Indikator	Tujan	Sasaran	IKD	IKKLPD	SPM	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara																			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
8	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					✓			1315 Rumah Tangga	1862 Rumah Tangga	752 Rumah Tangga		1315 Rumah Tangga	1862 Rumah Tangga	752 Rumah Tangga		100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
9	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM					✓		13.72 %	16.17 %	18.88 %	20.31 %	12.91 %	13.66 %	16.31 %	18.61 %	84.46 %	86.36 %	91.59 %	87.6 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
11	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun					✓			47383 SR	55323 SR	59513 SR		48772 SR	56107 SR	57202 SR		100%	100%	96%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
12	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun					✓			6 Dokumen				6 Dokumen				100%			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
13	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan					✓				10 Liter/ Detik	2 Liter/ Detik			10 Liter/ Detik	2 Liter/ Detik			100%	100%	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
14	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					✓			4050 SR	5052 SR	940 SR		4050 SR	5052 SR	940 SR		100%	100%	100%	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
15	Jumlah Sistem Penyediaan Air					✓			2094 Unit	1986 Unit			2094 Unit	1986 Unit			100%	100%		Fasilitasi Kerja Sama	

N o	Indikator	Tuj uan	Sasa ran	IK D	IK K LP PD	SP M	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	202 1	2022	202 3	202 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama																			Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
16	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman					✓		53.99 %	55.20 %	56.36 %	57.48 %	51.23 %	52.12 %	54.62 %	56.93 %	94.8 7%	95.5 %	96.9 %	99.0 6%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
17	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi					✓			482 Rumah Tangga	435 Rumah Tangga	335 Rumah Tangga		300 Rumah Tangga	410 Rumah Tangga	550 Rumah Tangga		62.2 %	94.3 %	100 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
18	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar					✓			99 Rumah Tangga	45 Rumah Tangga	33 Rumah Tangga		99 Rumah Tangga	45 Rumah Tangga	33 Rumah Tangga		100%	100 %	100 %	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
19	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun					✓			74.8 M³/Hari	45 M³/Hari	220 M³/Hari		74.8 M³/Hari	45 M³/Hari	220 M³/Hari		100%	100 %	100 %	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
20	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan					✓			1 Unit				1 Unit				100 %			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
21	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi					✓			1 Unit				1 Unit				100 %			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
22	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik							1666 M1	1866 M1	1779 M1	1850 M1	1666 M1	1866 M1	1779 M1	1850 M1	100 %	100 %	100 %	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	

No	Indikator	Tujan	Sasaran	IKD	IKKLPD	SPM	Base line	Target Tahun				Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan, direhab dan dipelihara								1867 M1	1779 M1	1850 M1		1867 M1	1779 M1	1850 M1		100%	100%	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
24	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun								3 Dokumen				3 Dokumen				100%			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
25	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan								500 ml				500 ml				100%			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
26	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi								4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan		4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan		100%	100%	100%	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
27	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara								27 Sistem Drainase Perkotaan	27 Sistem Drainase Perkotaan	27 Sistem Drainase Perkotaan		27 Sistem Drainase Perkotaan	27 Sistem Drainase Perkotaan	27 Sistem Drainase Perkotaan		100%	100%	100%	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
28	Persentase Peningkatan kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungannya		✓					80 %	80 %	80 %	100 %	96.9 %	80 %	92 %	87.5 %	100 %	100 %	100 %	87.5 %	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungannya
29	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis							67 %	60 %	60 %	60 %	93.75 %	60 %	83 %	75 %	100 %	100 %	100 %	75 %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	IKKLPD	SPM	Base line	Target Tahun				Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	dengan Kebijakan Strategis																			BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
34	Jumlah bangunan yang direvitalisasi								2 Unit	7 Unit	1 Unit		2 Unit	7 Unit	1 Unit		100 %	100 %	100 %	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
35	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata								2 Kawasan	7 Kawasan	1 Kawasan		2 Kawasan	7 Kawasan	1 Kawasan		100 %	100 %	100 %	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
36	Persentase pertumbuhan tenaga terampil yang memiliki sertifikat		✓					9.95 %	9.89 %	9.71 %	12.30 %	3.66 %	11.23 %	13.63 %	12.18 %	36.81 %	100 %	100 %	100 %	Meningkatkan kualitas SDM Jasa Konstruksi yang mendorong perekonomian lokal
37	Persentase rekomendasi IUJK yang diterbitkan							35 %	40 %	45 %	50 %	79.86 %	30.86 %	77.14 %	82.72 %	100 %	77 %	100 %	100 %	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
38	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di Kabupaten Gresik									4 Kali	15 Kali			4 Kali	15 Kali			100 %	100 %	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
39	Jumlah Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan									121 Orang	462 Orang			121 Orang	462 Orang			100 %	100 %	Penyediaan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
40	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan									198 Orang				198 Orang				100 %		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan

N o	Indikator	Tuj uan	Sasa ran	IK D	IK K LP PD	SP M	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	202 1	2022	202 3	202 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi																			Operator dan Teknisi atau Analis	
41	Jumlah layanan informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Gresik									8 Media	4 Media			8 Media	4 Media			100 %	100 %	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
42	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan										1 Layan an Inform asi				1 Layan an Inform asi				100 %	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
43	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi									496 Lapora n				496 Lapora n				100 %		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
44	Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang diterbitkan								1 Regula si	4 Regula si	3 Regul asi		1 Regula si	4 Regula si	3 Regul asi		100 %	100 %	100 %	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	
45	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun								1 Doku men	2 Doku men	3 Doku men		1 Doku men	2 Doku men	3 Doku men		100 %	100 %	100 %	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
46	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi									124 Orang				124 Orang				100 %		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	
47	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memenuhi ketertiban								21.25 %	29.41 %	58.82 %		9.14 %	77.14 %	82.72 %		17.96 %	26.12 %	100 %	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib	

N o	Indikator	Tuj uan	Sasa ran	IK D	IK K LP PD	SP M	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	202 1	2022	202 3	202 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	penyelenggaraan Jasa Konstruksi																			Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
4 8	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk										1 Lemba ga				1 Lemba ga				100 %	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
4 9	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan										109 Paket Pekerj aan				109 Paket Pekerj aan				100 %	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
5 0	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha									208 Badan Usaha	67 Badan Usaha			208 Badan Usaha	67 Badan Usaha			100 %	100 %	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
5 1	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								78 Orang	110 Orang			78 Orang	110 Orang			100 %	100 %		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
5 2	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum		✓					2.2 %	4.59 %	9.68 %	14.9 %	4.35 %	13.95 %	15.80 %	22.86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	
5 3	Persentase Penurunan Backlog Perumahan							3.76	4.08	9.24	10.43	7.28	12.89	9.72	16.60	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

No	Indikator	Tujan	Sasaran	IKD	IKKLPD	SPM	Base line	Target Tahun				Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
54	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					✓			1 Dokumen	3 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	3 Laporan	1 Laporan		1 Dokumen	100 %	100 %	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
55	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					✓			1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen		100 %	100 %	100 %	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
56	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					✓				3 Unit Rumah				3 Unit Rumah				100 %		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
57	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi					✓														Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
58	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan					✓				3 Unit Rumah				3 Unit Rumah				100 %		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
59	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional (administrasi, kebersihan, keamanan, pemeliharaan gedung, pemenuhan sarana dasar umum)							7 Rusun	7 Rusun	7 Rusun	7 Rusun	7 Rusun	7 Rusun	7 Rusun	7 Rusun	100 %	100 %	100 %	100 %	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

N o	Indikator	Tuj uan	Sasa ran	IK D	IK K LP PD	SP M	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	202 1	2022	202 3	202 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
60	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							450 Doku men	500 Doku men	700 Doku men	642 Doku men	450 Doku men	500 Doku men	700 Doku men	642 Doku men	100 %	100 %	100 %	100 %	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
61	Persentase Luas kawasan kumuh		✓				83.41	99.36 %	99.29 %	99.21 %	99.13 %	95.60 %	63.32 %	12.61 %	11.32 %	4.40 %	36.68 %	87.39 %	88.68 %	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	
62	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani							4.12 %	4.53 %	4.99 %	5.48 %	2.41 %	12.64 %	14.13 %	12.19 %	58.6 %	100 %	100 %	100 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
63	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani							3.29 %	3.62 %	3.98 %	4.38 %	2.61 %	1.04 %	7.39 %	10.11 %	79.28 %	28.86 %	100 %	100 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
64	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani						16.59 %	2.49 %	2.49 %	2.49 %	2.49 %	1.87 %	5.21 %	1.65 %	2.04 %	74.9 %	100 %	66.2 %	81.9 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
65	Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							4 Doku men	4 Doku men	6 Doku men	1 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	6 Doku men	1 Doku men	100 %	100 %	100 %	100 %	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
66	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh							2 Doku men	2 Doku men	3 Doku men		2 Doku men	2 Doku men	3 Doku men		100 %	100 %	100 %		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
67	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik										1 Lapor an				1 Lapor an				100 %	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan	

No	Indikator	Tujan	Sasaran	IKD	IKKLPD	SPM	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																			Berkembangnya Permukiman Kumuh	
68	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina							4 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat		4 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat		100 %	100 %	100 %		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
69	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		100 %	100 %	100 %		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
70	Pertumbuhan Rumah Layak Huni						16.59 %	19.08 %	21.57 %	24.06 %	26.55 %	18.46 %	23.67 %	25.32 %	27.36 %	96.72 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
71	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki							749 Unit Rumah	2092 Unit Rumah	384 Unit Rumah	293 Unit Rumah	749 Unit Rumah	2092 Unit Rumah	384 Unit Rumah	293 Unit Rumah	100 %	100 %	100 %	100 %	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
72	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
73	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan										7,47 Ha				7,47 Ha				100 %	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	

N o	Indikator	Tuj uan	Sasa ran	IK D	IK K LP PD	SP M	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	202 1	2022	202 3	202 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7 4	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar									218.86 Ha	218.86Ha			218.86 Ha	218.86Ha			100 %	100 %	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
7 5	Persentase Pertumbuhan PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan dalam kondisi baik		✓				1.67 %	1.83 %	1.99 %	2.51 %	3.54 %	0.52 %	3.44 %	3.43 %	4.25 %	28.56 %	100 %	100 %	100 %	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	
7 6	Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik						1.67 %	0.16 %	0.16 %	0.52 %	0.52 %	0.94 %	0.92 %	0.35 %	0.82 %	100 %	100 %	67 %	100 %	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
7 8	Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik							2.60 %	0.83 %	0.83 %	3.31 %	0.59 %	0.71 %	0.12 %	0	71.43 %	85.71 %	3.57 %	0	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
7 7	Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik							0.06 %	0.06 %	0.07 %	0.07 %	0.04 %	0.05 %	0.14 %	0.18 %	66.75 %	73.67 %	100 %	100 %	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
7 8	Jumlah lokasi Penyelenggaraan PSU makam Perumahan									4 Lokasi	4 Lokasi			4 Lokasi	4 Lokasi			100 %	100 %	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
7 9	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan							3 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen			8 Dokumen	1 Dokumen			100 %	100 %		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
8 0	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan									10 Lokasi	4 Lokasi			10 Lokasi	4 Lokasi			100 %	100 %	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	

No	Indikator	Tujan	Sasaran	IKD	IKKLPD	SPM	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian																			di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
81	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan							20 Laporan	24 Laporan	24 Laporan		20 Laporan	24 Laporan	24 Laporan			100 %	100 %		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
82	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang									10 Laporan	4 Laporan			10 Laporan	4 Laporan			100 %	100 %	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
83	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
84	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan capaian kinerja							9 Dokumen	9 Dokumen	11 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	11 Dokumen	9 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
85	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							9 Dokumen	9 Dokumen	11 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	11 Dokumen	9 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
86	Jumlah penyusunan laporan keuangan							11 Laporan	11 Laporan	25 Laporan	14 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	25 Laporan	14 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
87	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi							11 Laporan	11 Laporan	25 Laporan	14 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	25 Laporan	14 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

N o	Indikator	Tuj uan	Sasa ran	IK D	IK K LP PD	SP M	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	202 1	2022	202 3	202 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD																				
8 8	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							61 Orang	83 Orang	87 Orang	85 Orang	61 Orang	83 Orang	87 Orang	85 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
8 9	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							20 Paket	20 Paket	34 Paket	34 Paket	20 Paket	18 Paket	34 Paket	34 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
9 0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
9 1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							11 Paket	11 Paket	25 Paket	20 Paket	11 Paket	11 Paket	25 Paket	20 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
9 2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
9 3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							3 Paket	4 Paket	1 Paket	5 Paket	3 Paket	4 Paket	1 Paket	5 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
9 4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							2 Paket	2 Paket	5 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	5 Paket	2 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
9 5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan							2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	

N o	Indikator	Tuj uan	Sasa ran	IK D	IK K LP PD	SP M	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	202 1	2022	202 3	202 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
96	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							30 Lapora n	35 Lapora n	40 Lapora n	40 Lapor an	30 Lapora n	35 Lapora n	40 Lapora n	40 Lapor an	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
97	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										1 Paket				1 Paket				100 %	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
98	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							40 Lapora n	54 Lapora n	89 Lapora n	89 Lapor an	40 Lapora n	54 Lapora n	89 Lapora n	89 Lapor an	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
99	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							7 Lapora n	12 Lapora n	36 Lapora n	30 Lapor an	7 Lapora n	12 Lapora n	36 Lapora n	30 Lapor an	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							2 Lapora n	2 Lapora n	5 Lapora n	5 Lapor an	2 Lapora n	2 Lapora n	5 Lapora n	5 Lapor an	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
101	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							31 Lapora n	40 Lapora n	48 Lapora n	48 Lapor an		40 Lapora n	48 Lapora n	48 Lapor an	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
102	Jumlah Kendaraan dan gedung yang mendapatkan perawatan rutin									27 Unit	27 Unit			27 Unit	27 Unit			100 %	100 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
103	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang									25 Unit	25 Unit			25 Unit	25 Unit			100 %	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	

No	Indikator	Tujan	Sasaran	IKD	IKKLPD	SPM	Base line	Target Tahun					Realisasi Tahun				Capaian				Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
104	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit			100 %	100 %	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
105	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									1 Unit	1 Unit			1 Unit	1 Unit			100 %	100 %	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah masyarakat atau individu yang secara langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penentuan kelompok sasaran didasarkan pada kebutuhan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuannya adalah agar setiap layanan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menjawab permasalahan atau kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, program yang disusun menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Identifikasi Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran layanan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman: penerima manfaat program pembangunan IPAL komunal, septik tank individual, dan program sanitasi berbasis masyarakat.
- b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan: penerima manfaat program pembangunan rumah MBR, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan perbaikan RTLH.
- c. Masyarakat di Kawasan Kumuh: penerima manfaat program penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu.
- d. Rumah Tangga dengan Akses Air Siap Minum Perpipaan: penerima manfaat program SPAM, perluasan jaringan pipa PDAM, dan layanan sambungan rumah baru.
- e. Masyarakat Terdampak Bencana atau Relokasi: penerima manfaat program penyediaan hunian sementara dan hunian tetap yang layak dan aman.
- f. Pengembang Perumahan dan Masyarakat Penghuni: penerima manfaat program penyerahan dan pengelolaan PSU perumahan dan permukiman.

2. Kebutuhan Kelompok Sasaran

- a. Kebutuhan sanitasi aman, termasuk sarana pembuangan air limbah dan fasilitas pendukung.
- b. Kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi MBR serta perbaikan rumah tidak layak huni.

- c. Kebutuhan penataan lingkungan yang sehat dan bebas kumuh.
- d. Kebutuhan air minum yang aman dan dapat diakses melalui jaringan perpipaan.
- e. Kebutuhan hunian layak dan aman bagi masyarakat yang direlokasi pasca bencana.
- f. Kebutuhan kepastian pengelolaan PSU perumahan agar prasarana lingkungan dapat terpelihara.

3. Rencana Layanan yang Diberikan

- a. Pembangunan IPAL komunal, septik tank individual, dan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Program pembangunan rumah MBR, fasilitasi pembiayaan, dan bantuan perbaikan rumah.
- c. Program penataan kawasan kumuh, pembangunan jalan lingkungan, dan drainase
- d. Perluasan jaringan pipa PDAM dan pembangunan sambungan rumah baru.
- e. Penyediaan hunian darurat dan hunian tetap bagi korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi.
- f. Percepatan serah terima PSU perumahan dari pengembang ke pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan berkelanjutan.

4. Dampak yang Diharapkan

- a. Meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman.
- b. Menurunnya backlog perumahan dan meningkatnya akses hunian layak.
- c. Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.
- d. Meningkatnya cakupan layanan air minum perpipaan.
- e. Tersedianya hunian yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak bencana atau relokasi.
- f. Terjaganya kualitas prasarana lingkungan perumahan melalui penanganan PSU yang terkelola dengan baik.
- g. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik tidak bekerja secara terpisah, melainkan membutuhkan sinergi dengan perangkat daerah lain yang memiliki urusan dan program yang saling terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan bersifat komprehensif, terintegrasi, dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Berikut adalah daftar perangkat daerah yang menjadi mitra strategis beserta bentuk irisan kegiatannya:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR): Koordinasi pembangunan jaringan jalan, drainase utama, penataan tata ruang, dan integrasi infrastruktur kawasan.
2. Dinas Lingkungan Hidup: Kolaborasi dalam pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran lingkungan, serta pengelolaan air limbah domestik.
3. Dinas Sosial: Sinergi dalam penyaluran bantuan perumahan bagi MBR, masyarakat terdampak bencana, dan kelompok rentan lainnya.
4. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah): Penyediaan hunian darurat dan relokasi masyarakat terdampak bencana, serta koordinasi penanganan pascabencana.
5. Dinas Kesehatan: Kolaborasi dalam program kesehatan lingkungan, penurunan stunting melalui penyediaan sanitasi aman dan air bersih.
6. Dinas Tenaga Kerja: Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur.
7. DPMPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu): Integrasi layanan perizinan bangunan gedung (SPPST) berbasis OSS dan penyederhanaan prosedur perizinan.
8. Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan: Pelaksanaan program penataan lingkungan, identifikasi kawasan kumuh, dan pendampingan masyarakat secara langsung.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting, khususnya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum atau PDAM. Peran PDAM dalam mendukung

kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

1. Penyediaan Layanan Air Minum: PDAM bertanggung jawab memproduksi dan mendistribusikan air minum melalui jaringan perpipaan, sehingga dapat meningkatkan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air siap minum.
2. Ekspansi Jaringan dan Sambungan Baru: Melakukan perluasan jaringan pipa dan menambah sambungan rumah baru sesuai target perluasan cakupan layanan yang ditetapkan dalam RPJMD.
3. Sinergi Perencanaan: Berkoordinasi dengan dinas dalam perencanaan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) kawasan strategis dan kawasan prioritas pembangunan permukiman.

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang cipta karya, perumahan, dan kawasan permukiman, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pendanaan, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Beberapa mitra kerja sama strategis antara lain: Habitat for Humanity Indonesia, yang berperan dalam program pembangunan dan perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah; TNI AL dan Kodim, yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan kegiatan padat karya berbasis gotong royong; BAZNAS, yang berkontribusi dalam penyediaan bantuan pembiayaan bagi rumah layak huni serta peningkatan akses sanitasi melalui pemanfaatan dana zakat; serta REI (Real Estate Indonesia), yang berperan dalam pembangunan perumahan, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta percepatan serah terima PSU kepada pemerintah daerah.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik masih menghadapi sejumlah permasalahan pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Backlog perumahan

Permintaan hunian layak terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, sementara kapasitas pembangunan perumahan, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum mampu mengimbangi kebutuhan. Akibatnya backlog perumahan tetap tinggi dan memerlukan intervensi program penyediaan rumah baru serta perbaikan rumah tidak layak huni.

2. Kawasan permukiman kumuh

Di beberapa wilayah perkotaan dan perdesaan masih ditemukan kawasan kumuh dengan kondisi rumah tidak layak huni, drainase buruk, jalan lingkungan rusak, dan sanitasi tidak memadai. Hal ini berdampak pada kualitas kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat, sehingga memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan.

3. Akses air minum dan sanitasi aman

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi aman masih belum mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Masih terdapat desa yang belum mencapai status bebas buang air besar sembarangan (BABS), sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat.

4. Kualitas infrastruktur

Infrastruktur lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase, dan sistem persampahan belum terbangun secara merata. Beberapa infrastruktur yang sudah ada mengalami kerusakan akibat keterbatasan anggaran pemeliharaan, sehingga menurunkan kualitas pelayanan.

5. Rendahnya kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi.

Belum seluruh tenaga kerja konstruksi memiliki pelatihan dan sertifikasi sesuai standar, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan pembangunan infrastruktur.

6. Pengawasan BUKJ belum optimal.

Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dalam pelaksanaan proyek pembangunan perlu ditingkatkan agar kualitas pekerjaan memenuhi standar teknis dan keselamatan.

7. Pemeliharaan bangunan gedung negara belum optimal.

Banyak bangunan gedung milik pemerintah memerlukan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi agar tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan fungsional.

8. Proses penerbitan SPPST Bangunan Gedung belum sepenuhnya cepat dan terintegrasi.

Masih terdapat kendala dalam sistem perizinan bangunan yang dapat menghambat investasi dan pembangunan.

9. Pemenuhan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) perumahan dan permukiman.

Masih terdapat perumahan yang belum diserahkan PSU-nya kepada pemerintah daerah sehingga pengelolaan dan pemeliharaan belum optimal.

2.2.2 Isu strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik perlu mengantisipasi berbagai isu strategis yang muncul dari dinamika pembangunan global, nasional, regional, maupun lokal. Isu strategis ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar, perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, drainase, serta penataan bangunan dan lingkungan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, isu strategis yang relevan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 3 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Jaringan koperasi, UMKM, ekonomi pesantren , serta pasar terbuka	Masih terdapat kawasan kumuh, RTLH, dan keterbatasan akses air minum dan sanitasi aman.	Penanggulangan Kemiskinan	Konflik internasional	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penanggulangan Kemiskinan	Penuntasan kawasan kumuh, perbaikan RTLH, perluasan akses air minum dan sanitasi aman, serta penguatan peran

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
melalui pelabuhan dapat menjadi motor pengentasan kemiskinan.						masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.
Letak strategis Gresik, pelabuhan internasional, dan peluang KPBU mendukung percepatan pembangunan konektivitas.	Infrastruktur permukiman (jalan lingkungan, drainase, PSU) belum memadai; backlog perumahan masih tinggi.	Keterbatasan Infrastruktur Permukiman	Aglomerasi	Meningkatkan Konektivitas		Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman (jalan lingkungan, drainase, SPAM), percepatan serah terima PSU, pembangunan rumah MBR, serta penguatan skema pembiayaan inovatif (KPBU, CSR).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran, Strategis, Dan Arah Kebijakan

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik untuk periode 2025–2029. Perumusan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pada Bab II, dengan mempertimbangkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama, menjawab tantangan pembangunan, serta memanfaatkan peluang yang ada sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran strategis juga memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga capaian yang dihasilkan dapat diukur secara jelas, realistis, dan sesuai dengan jangka waktu perencanaan. Dengan demikian, dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Dari perumususan tersebut Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menghasilkan 5 Sasaran Strategis sebagaimana berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1) Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan 2) Menguatkankualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing 3) Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan 4) Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Terwujudnya kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur strategis dan pelayanan dasar yang layak dan berkelanjutan, termasuk akses sanitasi aman, hunian layak, air minum yang merata, serta penataan bangunan dan lingkungan yang berkualitas		Usia harapan hidup (UHH)	✓			74.57	74.82	75.08	75.33	75.59	75.84	
2				Indeks Infrastuktur (Angka)				63.23	67.86	69.07	70.48	71.57	72.66	
3				Indeks kualitas lingkungan hidup (Angka)				65.09	65.16	65.24	65.32	66.4	65.48	
4				Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)				48	46	44	42	40	38	
5			Meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	✓		✓	23,41	25,35	27,3	29,25	31,2	33,15	
6			Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung (%)				50,11	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	
7			Meningkatkan Kualitas Infrastruktur PSU Perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani (%)		✓		0,06	0,06	0,1	0,11	0,15	0,15	
8			Meningkatnya kualitas infrastruktur sistem drainase permukiman dalam kondisi baik	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik (%)				64,13	71,3	78,48	85,65	92,83	100	
9			Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan (%)		✓		7	7,63	8,38	9,28	10,36	11,72	
10			Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan melalui Penyediaan Hunian Layak dan Air Minum yang Merata bagi Seluruh Rumah Tangga.	Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan		✓		100	100	100	100	100	100	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				hunian layak dan aman (%)										
11				Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (%)		✓		0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	
12				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	✓		✓	82,4	83,28	84,82	86,36	87,74	89,26	
13				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	✓		✓	78,81	80,14	81,46	82,79	84,12	85	

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pentahapan pembangunan DCKPKP merupakan prioritas pembangunan tahunan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pada periode 2025–2029. Pentahapan ini mengacu pada pentahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik dengan fokus pada penyediaan hunian layak, infrastruktur permukiman, air minum, sanitasi, dan penataan lingkungan.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Infrastruktur Permukiman dan Akses Dasar	Penguatan Layanan Perumahan dan Penataan Kawasan	Pemerataan Akses Layanan Permukiman	Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Infrastruktur	Konsolidasi dan Kemandirian Pembangunan
Pentahapan Pembangunan				
Pemantapan penyediaan air minum perpipaan, pembangunan SPAM kawasan prioritas, pembangunan IPAL komunal dan septik tank individual, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan jalan lingkungan dan drainase utama.	Penanganan kawasan kumuh secara terpadu, percepatan serah terima PSU perumahan dari pengembang, penguatan peran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, dan pelatihan tenaga konstruksi bersertifikat.	Perluasan cakupan sambungan rumah PDAM, pembangunan hunian baru untuk MBR, penataan kawasan permukiman berbasis RT/RW, peningkatan cakupan sanitasi aman, serta peningkatan keterpaduan sistem drainase lingkungan.	Modernisasi sistem perizinan bangunan (SPPST) berbasis digital, rehabilitasi bangunan gedung negara, pemeliharaan infrastruktur permukiman berbasis rencana jangka panjang, dan penguatan tata kelola pengelolaan air limbah.	Konsolidasi pencapaian program, optimalisasi pembiayaan alternatif (KPBU, CSR), penguatan kelembagaan pengelola infrastruktur, serta penerapan konsep permukiman berkelanjutan dan adaptif perubahan iklim.

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dirumuskan untuk memastikan keterkaitan antara NSPK nasional, sasaran RPJMD, dan kebijakan teknis perangkat daerah. Arah kebijakan dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD	KET.
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan,	Melindungi masyarakat dari dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur tangguh	Pengelolaan kawasan berbasis mitigasi bencana, pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD	KET.
1	2	3	4	5
	kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan, termasuk pengaturan sistem drainase lingkungan dan pencegahan banjir.	dan responsif yang mendukung keselamatan dan keberlangsungan akses terhadap layanan dasar.		
2	Penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu melalui penyediaan prasarana, sarana, utilitas, perbaikan kualitas rumah, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekumuhan baru.	Menjamin akses infrastruktur dasar secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, guna mendukung peningkatan kualitas hidup dan pemerataan layanan publik.	Program pembangunan rumah MBR, fasilitasi pembiayaan perumahan, perbaikan RTLH, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan jalan lingkungan dan drainase	
3	Pengelolaan air limbah domestik dan sanitasi aman sesuai ketentuan SPM bidang Cipta Karya.		Perluasan jaringan air bersih, pembangunan IPAL komunal, dan penguatan sanitasi berbasis masyarakat	
4	Fasilitasi serah terima dan pengelolaan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah agar dikelola berkelanjutan.		Percepatan serah terima PSU dan pengelolaan prasarana lingkungan agar berkelanjutan	
5	Penyelenggaraan pengawasan bangunan gedung serta Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.		Modernisasi SPPST Bangunan Gedung, pengawasan BUJK, dan penegakan persyaratan teknis bangunan	
6	Peningkatan kapasitas SDM jasa konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi, dan penjaminan mutu hasil pekerjaan.	Meningkatkan kapabilitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang inklusif serta menjangkau kelompok rentan dan muda agar mampu memasuki dunia kerja secara produktif dan berkelanjutan.	Pelatihan, sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan penguatan pengawas bidang jasa konstruksi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perumusan program mengacu pada urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029. Rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta target capaian tahunan akan disajikan secara lebih lengkap pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
					42.348.527.000,00		43.586.692.000,00		45.165.222.000,00		47.397.811.000,00		48.827.638.000,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Tercapainya sasaran strategis UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik	Realisasi Belanja Infrastruktur air minum, air limbah, drainase (%)	100	100	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					15.768.947.000,00		16.236.617.000,00		16.832.848.000,00		17.676.125.000,00		18.215.755.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rasio rumah tangga perdesaan yang terlayani Air Bersih Perpipaan (%)	0,36	0,36	0,36	15.768.947.000,00	0,36	16.236.617.000,00	0,37	16.832.848.000,00	0,37	17.676.125.000,00	0,37	18.215.755.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.865.733.000,00		10.158.328.000,00		10.531.355.000,00		11.058.946.000,00		11.396.562.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak (%)	93,22	94,29	95,36	9.375.531.000,00	96,43	9.653.588.000,00	97,50	10.008.080.000,00	98,57	10.509.457.000,00	99,64	10.830.298.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah pada UPT	Persentase Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak (%)	56,93	91,72	91,73	490.202.000,00	91,74	504.740.000,00	91,74	523.275.000,00	91,75	549.489.000,00	91,76	566.264.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Limbah Cair Domestik														
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.526.223.000,00		3.630.803.000,00		3.764.131.000,00		3.952.703.000,00		4.073.374.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase sistem drainase lingkungan permukiman yang berfungsi baik (%)	100	100	100	3.526.223.000,00	100	3.630.803.000,00	100	3.764.131.000,00	100	3.952.703.000,00	100	4.073.374.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					12.329.792.000,00		12.695.465.000,00		13.161.660.000,00		13.821.021.000,00		14.242.959.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase gedung pemerintah yang menerapkan efisiensi energi (%)	100	100	100	12.329.792.000,00	100	12.695.465.000,00	100	13.161.660.000,00	100	13.821.021.000,00	100	14.242.959.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Kelompok Rentan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					54.104.000,00		55.709.000,00		57.755.000,00		60.648.000,00		63.648.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis (%)	100	100	100	54.104.000,00	100	55.709.000,00	100	57.755.000,00	100	60.648.000,00	100	63.648.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					203.728.000,00		209.770.000,00		217.473.000,00		228.368.000,00		235.340.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memenuhi ketertiban penyelenggaraan	31,60	31,60	33,02	203.728.000,00	35,38	209.770.000,00	37,74	217.473.000,00	40,09	228.368.000,00	42,45	235.340.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jasa Konstruksi (%)													Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Rekomendasi Tenaga Kerja Kontruksi Bersertifikasi (%)	16,67	16,67	33,33		50,00		66,67		83,33		100		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				45.060.657.000,0046.414.845.000,0048.141.295.000,0050.583.093.000,0052.145.650.000,00										
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.686.413.000,00		16.169.430.000,00		16.785.227.000,00		17.656.176.000,00		18.213.515.000,00	
Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur Sektor Perumahan dan Permukiman (%)	94,32	94,5	94,5	15.686.413.000,00	94,5	16.169.430.000,00	94,5	16.785.227.000,00	94,5	17.656.176.000,00	94,5	18.213.515.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.141.865.000,00		1.175.730.000,00		1.218.904.000,00		1.279.968.000,00		1.319.044.000,00	
Meningkatnya keluarga MBR yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni	Persentase Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni (%)	32,70	33,45	34,68	138.683.000,00	35,93	172.548.000,00	37,22	215.722.000,00	38,54	276.786.000,00	39,89	315.862.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya keluarga MBR yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	Persentase keluarga MBR yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni (%)	0,74	0,74	1,23	1.003.182.000,00	1,26	1.003.182.000,00	1,29	1.003.182.000,00	1,32	1.003.182.000,00	1,35	1.003.182.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					14.187.086.000,00		14.607.842.000,00		15.144.262.000,00		15.902.946.000,00		16.388.443.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani (%)	12,19	12,24	12,28		12,32		12,36		12,40		12,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani (%)	11,80	15,40	19,15	14.187.086.000,00	23,04	14.607.842.000,00	27,07	15.144.262.000,00	31,25	15.902.946.000,00	35,58	16.388.443.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani (%)	10,11	10,14	10,17		10,20		10,23		10,26		10,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					14.045.293.000,00		14.461.843.000,00		14.992.902.000,00		15.744.003.000,00		16.224.648.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	50,37	50,65	50,93		51,22		51,50		51,79		52,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik (%)	4,02	4,14	4,26	14.045.293.000,00	4,49	14.461.843.000,00	4,73	14.992.902.000,00	5,08	15.744.003.000,00	5,44	16.224.648.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Saluran Lingkungan dalam kondisi baik (%)	8,11	8,14	8,18		8,22		8,25		8,29		8,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan disusun untuk memastikan keterpaduan sasaran strategis dengan sumber daya 2025–2029. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD tahun 2030-2034. Rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan estimasi kebutuhan anggaran per tahun akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				42.348.527.00 0		43.586.692.00 0		45.165.222.00 0		47.397.811.00 0		48.827.638.00 0		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tercapainya sasaran strategis UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik	Realisasi Belanja Infrastruktur air minum, air limbah, drainase (%)	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	1.04.1.03.0.00.0 1.0038 - UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik	
1.03.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		
1.03.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				15.768.947.00 0		16.236.617.00 0		16.832.848.00 0		17.676.125.00 0		18.215.755.00 0		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rasio rumah tangga perdesaan yang terlayani Air Bersih Perpipaan (%)	0,36	0,36	15.768.947.00 0	0,36	16.236.617.00 0	0,37	16.832.848.00 0	0,37	17.676.125.00 0	0,37	18.215.755.00 0	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				15.768.947.00 0		16.236.617.00 0		16.832.848.00 0		17.676.125.00 0		18.215.755.00 0		
Meningkatkan akses dan kualitas layanan air minum melalui pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	767	670	15.768.947.00 0	670	16.236.617.00 0	670	16.832.848.00 0	670	17.676.125.00 0	670	18.215.755.00 0		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	11	11		11		11		11					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	2	2		2		2		2		2			
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.266.747.337,74		1.304.316.094,07		1.352.212.382,38		1.419.954.311,81		1.463.303.741,91		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	2	2	1.266.747.337,74	2	1.304.316.094,07	2	1.352.212.382,38	2	1.419.954.311,81	2	1.463.303.741,91		
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	0.1	50.000.000	0.1	75.000.000	0.1	100.000.000	0.1	125.000.000	0.1	150.000.000		
1.03.03.2.01.0030 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				174.968.082,43		180.157.225,56		186.772.847,7		196.129.627,17		202.117.219,51		
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	11	11	174.968.082,43	11	180.157.225,56	11	186.772.847,7	11	196.129.627,17	11	202.117.219,51		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				14.277.231.579,83		14.677.143.680,37		15.193.862.769,92		15.935.041.061,02		16.400.334.038,58		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	767	670	14.277.231.579,83	670	14.677.143.680,37	670	15.193.862.769,92	670	15.935.041.061,02	670	16.400.334.038,58		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9.865.733.000		10.158.328.000		10.531.355.000		11.058.946.000		11.396.562.000		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak (%)	93,22	95,36	9.375.531.000	96,43	9.653.588.000	97,5	10.008.080.000	98,57	10.509.457.000	99,64	10.830.298.000	1.04.1.03.0.00.01.0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				9.375.531.000		9.653.588.000		10.008.080.000		10.509.457.000		10.830.298.000		
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan pengelolaan air limbah domestik yang aman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	220	160		180		200		220		240			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	0	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4			
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/ sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	19		20		21		22		23			
	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				79.318.453		81.670.856		84.669.916		88.911.639		91.626.002		
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	0	1	79.318.453	1	81.670.856	1	84.669.916	1	88.911.639	1	91.626.002		
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				8.678.422.170		8.935.804.255		9.263.938.595		9.728.035.630		10.025.020.576		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)	220	160	8.678.422.170	180	8.935.804.255	200	9.263.938.595	220	9.728.035.630	240	10.025.020.576		
1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				53.972.002		49.294.256		49.653.149		59.690.816		57.832.278		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)	0	0,4	53.972.002	0,4	49.294.256	0,4	49.653.149	0,4	59.690.816	0,4	57.832.278		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				563.818.375		586.818.633		609.818.340		632.818.915		655.819.144		
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	19	563.818.375	20	586.818.633	21	609.818.340	22	632.818.915	23	655.819.144		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah pada UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik	Persentase Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak (%)	56,93	91,73	490.202.000	91,74	504.740.000	91,74	523.275.000	91,75	549.489.000	91,76	566.264.000	1.04.1.03.0.00.01 .0038 - UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				490.202.000		504.740.000		523.275.000		549.489.000		566.264.000		
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan pengelolaan air limbah domestik yang aman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	135	150	490.202.000	152	504.740.000	154	523.275.000	156	549.489.000	158	566.264.000		
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	752	355		360		365		370		375			
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				150.780.957,4 8		155.252.768,3		160.953.865,7 4		169.017.184,0 2		174.177.069,7 4		
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	752	355	150.780.957,4 8	360	155.252.768,3	365	160.953.865,7 4	370	169.017.184,0 2	375	174.177.069,7 4		
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				339.421.042,5 2		349.487.231,7		362.321.134,2 6		380.471.815,9 8		392.086.930,2 6		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	135	150	339.421.042,5 2	152	349.487.231,7	154	362.321.134,2 6	156	380.471.815,9 8	158	392.086.930,2 6		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN				3.526.223.000		3.630.803.000		3.764.131.000		3.952.703.000		4.073.374.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase sistem drainase lingkungan permukiman yang berfungsi baik (%)	100	100	3.526.223.000	100	3.630.803.000	100	3.764.131.000	100	3.952.703.000	100	4.073.374.000	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.526.223.000		3.630.803.000		3.764.131.000		3.952.703.000		4.073.374.000		
Mewujudkan sistem drainase yang efektif dan berkelanjutan melalui pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase di daerah kabupaten/kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	27	27	3.526.223.000	27	3.630.803.000	27	3.764.131.000	27	3.952.703.000	27	4.073.374.000		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	4	1		1		1		1		1			
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	4	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				2.526.223.000		2.630.803.000		2.764.131.000		2.952.703.000		3.073.374.000		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	27	27	2.526.223.000	27	2.630.803.000	27	2.764.131.000	27	2.952.703.000	27	3.073.374.000		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				12.329.792.00 0		12.695.465.00 0		13.161.660.00 0		13.821.021.00 0		14.242.959.00 0		
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Kelompok Rentan (%)	100	100	12.329.792.00 0	100	12.695.465.00 0	100	13.161.660.00 0	100	13.821.021.00 0	100	14.242.959.00 0	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase gedung pemerintah yang menerapkan efisiensi energi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis (%)	100	100		100		100		100		100			
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan				12.329.792.00 0		12.695.465.00 0		13.161.660.00 0		13.821.021.00 0		14.242.959.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														
Terwujudnya bangunan gedung yang legal, layak fungsi, dan sesuai standar teknis penyelenggaraan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.098	150	12.329.792.000	150	12.695.465.000	150	13.161.660.000	150	13.821.021.000	150	14.242.959.000		
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	4		4		4		4		4			
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				12.029.792.000		12.395.465.000		12.861.660.000		13.521.021.000		13.942.959.000		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	4	12.029.792.000	4	12.395.465.000	4	12.861.660.000	4	13.521.021.000	4	13.942.959.000		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.098	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				54.104.000		55.709.000		57.755.000		60.648.000		63.648.000		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis (%)	100	100	54.104.000	100	55.709.000	100	57.755.000	100	60.648.000	100	63.648.000	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				54.104.000		55.709.000		57.755.000		60.648.000		63.648.000		
Terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan yang tertib, aman, dan mendukung kualitas permukiman	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1	54.104.000	1	55.709.000	1	57.755.000	1	60.648.000	1	63.648.000		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				54.104.000		55.709.000		57.755.000		60.648.000		63.648.000		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1	54.104.000	1	55.709.000	1	57.755.000	1	60.648.000	1	63.648.000		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				203.728.000		209.770.000		217.473.000		228.368.000		235.340.000		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Rekomendasi Tenaga Kerja Kontruksi Bersertifikasi (%)	16,67	33,33	203.728.000	50	209.770.000	66,67	217.473.000	83,33	228.368.000	100	235.340.000	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memenuhi ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi (%)	31,6	33,02		35,38		37,74		40,09		42,45			
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jumlah pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelengga ra Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis yang Disediakan (Orang)	462	175	100.000.000	175	100.000.000	175	100.000.000	175	100.000.000	175	100.000.000		
1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelengga ra Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis yang Disediakan (Orang)	462	175	100.000.000	175	100.000.000	175	100.000.000	175	100.000.000	175	100.000.000		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi yang mendukung keterbukaan data dan layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				93.728.000		99.770.000		107.473.000		118.368.000		125.340.000		
Terlaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan jasa konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1	2	93.728.000	2	99.770.000	2	107.473.000	2	118.368.000	2	125.340.000		
	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	67	50		50		50		50					
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	109	110		112		114		116		118			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1				1		1			
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	109	110	10.000.000	112	11.000.000	114	12.000.000	116	13.000.000	118	14.000.000		
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				9.364.000		11.885.000		15.236.500		20.184.000		23.170.000		
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1	2	9.364.000	2	11.885.000	2	15.236.500	2	20.184.000	2	23.170.000		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				9.364.000		11.885.000		15.236.500		20.184.000		23.170.000		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	67	50	9.364.000	50	11.885.000	50	15.236.500	50	20.184.000	50	23.170.000		
1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	65.000.000	1	65.000.000		65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				45.060.657.00 0		46.414.845.00 0		48.141.295.00 0		50.583.093.00 0		52.145.650.00 0		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.686.413.00 0		16.169.430.00 0		16.785.227.00 0		17.656.176.00 0		18.213.515.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur Sektor Perumahan dan Permukiman (%)	94,32	94,5	15.686.413.00 0	94,5	16.169.430.00 0	94,5	16.785.227.00 0	94,5	17.656.176.00 0	94,5	18.213.515.00 0	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100		100		100		100		100			
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				208.643.800,6 1		242.281.611,7		285.165.862,0 4		345.818.958,6 2		384.632.179,8 7		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	2	208.643.800,6 1	2	242.281.611,7	2	285.165.862,0 4	2	345.818.958,6 2	2	384.632.179,8 7		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				208.643.800,6 1		242.281.611,7		285.165.862,0 4		345.818.958,6 2		384.632.179,8 7		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	2	208.643.800,6 1	2	242.281.611,7	2	285.165.862,0 4	2	345.818.958,6 2	2	384.632.179,8 7		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.301.718.93 3,92		12.303.546.37 7,28		12.305.876.18 1,65		12.309.171.32 7,27		12.311.279.96 1,83		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	14	25	12.301.718.93 3,92	25	12.303.546.37 7,28	25	12.305.876.18 1,65	25	12.309.171.32 7,27	25	12.311.279.96 1,83		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	84	87		87		87		87		87			
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.290.383.76 5,04		12.290.383.76 5,04		12.290.383.76 5,04		12.290.383.76 5,04		12.290.383.76 5,04		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	84	87	12.290.383.76 5,04	87	12.290.383.76 5,04	87	12.290.383.76 5,04	87	12.290.383.76 5,04	87	12.290.383.76 5,04		
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.335.168,88		13.162.612,24		15.492.416,61		18.787.562,23		20.896.196,79		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	14	25	11.335.168,88	25	13.162.612,24	25	15.492.416,61	25	18.787.562,23	25	20.896.196,79		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				305.767.700,8 3		355.063.230,5		417.910.015,9 1		506.797.011		563.677.711,1 9		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	50	305.767.700,8 3	50	355.063.230,5	50	417.910.015,9 1	50	506.797.011	50	563.677.711,1 9		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	240		240		240		240		240			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				6.041.830,44		7.015.887,64		8.257.711,49		10.014.078		11.138.014,72		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	6.041.830,44	2	7.015.887,64	2	8.257.711,49	2	10.014.078	2	11.138.014,72		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.751.929,69		56.611.661,73		66.632.020,5		80.804.258,19		89.873.377,95		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	30	48.751.929,69	30	56.611.661,73	30	66.632.020,5	30	80.804.258,19	30	89.873.377,95		
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.527.208,26		5.257.079,75		6.187.591,66		7.503.655,9		8.345.833,72		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2	4.527.208,26	2	5.257.079,75	2	6.187.591,66	2	7.503.655,9	2	8.345.833,72		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.929.441,77		57.979.011,01		68.241.392,89		82.755.934,6		92.044.102,05		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	8	49.929.441,77	8	57.979.011,01	8	68.241.392,89	8	82.755.934,6	8	92.044.102,05		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.018.175,5		29.051.578,02		34.193.755,89		41.466.566,06		46.120.593,73		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	25.018.175,5	3	29.051.578,02	3	34.193.755,89	3	41.466.566,06	3	46.120.593,73		
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				533.215,75		619.180,2		728.776,13		883.782,52		982.974,44		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	240	533.215,75	240	619.180,2	240	728.776,13	240	883.782,52	240	982.974,44		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				156.435.204,88		181.655.515,15		213.808.845,03		259.284.725,08		288.385.718,95		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	50	156.435.204,88	50	181.655.515,15	50	213.808.845,03	50	259.284.725,08	50	288.385.718,95		
1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				14.530.694,54		16.873.317		19.859.922,32		24.084.010,65		26.787.095,63		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	14.530.694,54	1	16.873.317	1	19.859.922,32	1	24.084.010,65	1	26.787.095,63		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.274.821.378,83		2.641.565.559,08		3.109.127.079,3		3.770.420.067,89		4.193.595.676,28		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	48	2.274.821.378,83	48	2.641.565.559,08	48	3.109.127.079,3	48	3.770.420.067,89	48	4.193.595.676,28		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	30	36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	6		6		6		6		6			
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				224.743.579,78		260.976.490,5		307.169.765,63		372.502.962,74		414.311.080,95		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	30	36	224.743.579,78	36	260.976.490,5	36	307.169.765,63	36	372.502.962,74	36	414.311.080,95		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.312.799,05		28.232.481,56		33.229.677,99		40.297.434,48		44.820.243,88		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	6	24.312.799,05	6	28.232.481,56	6	33.229.677,99	6	40.297.434,48	6	44.820.243,88		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.025.765.000		2.352.356.587, 02		2.768.727.635, 68		3.357.619.670, 67		3.734.464.351, 45		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	48	2.025.765.000	48	2.352.356.587, 02	48	2.768.727.635, 68	48	3.357.619.670, 67	48	3.734.464.351, 45		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				595.461.185,8 1		626.973.221,4 4		667.147.861,1		723.968.635,2 2		760.329.470,8 3		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	595.461.185,8 1	1	626.973.221,4 4	1	667.147.861,1	1	723.968.635,2 2	1	760.329.470,8 3		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	27		27		27		27					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1					
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				119.449.674,9 7		138.707.219,1 1		163.258.628,7 9		197.982.776,0 5		220.203.504,8 2		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	27	119.449.674,9 7	27	138.707.219,1 1	27	163.258.628,7 9	27	197.982.776,0 5	27	220.203.504,8 2		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				76.011.510,84		88.266.002,33		103.889.232,3 1		125.985.859,1 7		140.125.966,0 1		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	76.011.510,84	1	88.266.002,33	1	103.889.232,3 1	1	125.985.859,1 7	1	140.125.966,0 1		
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.141.865.000		1.175.730.000		1.218.904.000		1.279.968.000		1.319.044.000		
Meningkatnya keluarga MBR yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi (%)	100	100	138.683.000	100	172.548.000	100	215.722.000	100	276.786.000	100	315.862.000	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni (%)	32,7	34,68		35,93		37,22		38,54		39,89			
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				38.683.000		72.548.000		115.722.000		176.786.000		215.862.000		
Meningkatkan penanganan hunian bagi korban bencana atau relokasi melalui pendataan, pembangunan, dan rehabilitasi rumah di daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	38.683.000	1	72.548.000	1	115.722.000	1	176.786.000	1	215.862.000		
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				12.894.600		24.182.933,34		38.574.266,66		58.928.933,34		71.954.266,66		
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	0	1	12.894.600	1	24.182.933,34	1	38.574.266,66	1	58.928.933,34	1	71.954.266,66		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				12.894.200		24.182.533,33		38.573.866,67		58.928.533,33		71.953.866,67		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	12.894.200	1	24.182.533,33	1	38.573.866,67	1	58.928.533,33	1	71.953.866,67		
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				12.894.200		24.182.533,33		38.573.866,67		58.928.533,33		71.953.866,67		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	12.894.200	1	24.182.533,33	1	38.573.866,67	1	58.928.533,33	1	71.953.866,67		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
Meningkatnya keluarga MBR yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	Persentase keluarga MBR yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni (%)	0,74	1,23	1.003.182.000	1,26	1.003.182.000	1,29	1.003.182.000	1,32	1.003.182.000	1,35	1.003.182.000	1.04.0.00.0.00.01 .0001 - UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (UPT Rusunawa)	
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.003.182.000		1.003.182.000		1.003.182.000		1.003.182.000		1.003.182.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang tertib, aman, dan berkelanjutan.	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	642	642	1.003.182.000	642	1.003.182.000	642	1.003.182.000	642	1.003.182.000	642	1.003.182.000		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.003.182.000		1.003.182.000		1.003.182.000		1.003.182.000		1.003.182.000		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	642	642	1.003.182.000	642	1.003.182.000	642	1.003.182.000	642	1.003.182.000	642	1.003.182.000		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				14.187.086.000		14.607.842.000		15.144.262.000		15.902.946.000		16.388.443.000		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani (%)	12,19	12,28	14.187.086.000	12,32	14.607.842.000	12,36	15.144.262.000	12,4	15.902.946.000	12,44	16.388.443.000	1.04.1.03.0.00.01 .0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani (%)	11,8	19,15		23,04		27,07		31,25		35,58			
	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani (%)	10,11	10,17		10,2		10,23		10,26		10,29			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				20.905.599,56		21.525.611,06		22.316.061,03		23.434.031,55		24.149.443,15		
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh skala kecil melalui penataan kawasan dengan luas di bawah 10 hektar	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/ dibina (Kelompok Masyarakat)	0	39	20.905.599,56	39	21.525.611,06	39	22.316.061,03	39	23.434.031,55	39	24.149.443,15		
1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				20.905.599,56		21.525.611,06		22.316.061,03		23.434.031,55		24.149.443,15		
Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/ dibina (Kelompok Masyarakat)	0	39	20.905.599,56	39	21.525.611,06	39	22.316.061,03	39	23.434.031,55	39	24.149.443,15		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				14.166.180.40 0,44		14.586.316.38 8,94		15.121.945.93 8,97		15.879.511.96 8,45		16.364.293.55 6,85		
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh skala kecil melalui penataan dan perbaikan kawasan dengan luas di bawah 10 hektar	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	0	127	14.166.180.40 0,44	134	14.586.316.38 8,94	144	15.121.945.93 8,97	151	15.879.511.96 8,45	158	16.364.293.55 6,85		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	293	138		146		156		164		172			
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	7,4	7,4		7,4		7,4		7,4		7,4			
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	0	5,5		6		6,5		7		7,5			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				7.302.664.454,44		7.519.244.510,78		7.795.361.485,51		8.185.886.691,25		8.435.791.547,3		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	293	138	7.302.664.454,44	146	7.519.244.510,78	156	7.795.361.485,51	164	8.185.886.691,25	172	8.435.791.547,3		
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				38.140.481,81		39.271.639,86		40.713.748,36		42.753.390,13		44.058.597,52		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	2	2	38.140.481,81	2	39.271.639,86	2	40.713.748,36	2	42.753.390,13	2	44.058.597,52		
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				197.008.815,98		202.851.639,62		210.300.630,13		220.836.087,28		227.577.936,11		
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	7,4	7,4	197.008.815,98	7,4	202.851.639,62	7,4	210.300.630,13	7,4	220.836.087,28	7,4	227.577.936,11		
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				6.326.829.080,55		6.514.468.127,54		6.753.688.334,95		7.092.028.709,72		7.308.539.453,23		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	0	127	6.326.829.080,55	134	6.514.468.127,54	144	6.753.688.334,95	151	7.092.028.709,72	158	7.308.539.453,23		
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				301.537.567,66		310.480.471,14		321.881.740,02		338.007.090,07		348.326.022,69		
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	0	5,5	301.537.567,66	6	310.480.471,14	6,5	321.881.740,02	7	338.007.090,07	7,5	348.326.022,69		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				14.045.293.000		14.461.843.000		14.992.902.000		15.744.003.000		16.224.648.000		
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	50,37	50,93	14.045.293.000	51,22	14.461.843.000	51,5	14.992.902.000	51,79	15.744.003.000	52,07	16.224.648.000	1.04.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase Saluran Lingkungan dalam kondisi baik (%)	8,11	8,18		8,22		8,25		8,29		8,33			
	Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik (%)	4,02	4,26		4,49		4,73		5,08		5,44			
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				14.045.293.000		14.461.843.000		14.992.902.000		15.744.003.000		16.224.648.000		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan perumahan untuk mendukung	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	4	23	14.045.293.000	30	14.461.843.000	40	14.992.902.000	50	15.744.003.000	60	16.224.648.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET .
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
hunian yang layak, tertib, dan berkelanjutan.	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	1		2		3		4		4			
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	4	6		8		10		12		14			
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	4	23	150.000.000	30	150.000.000	40	150.000.000	50	150.000.000	60	150.000.000		
1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				50.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	1	50.000.000	2	100.000.000	3	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				13.845.293.000		14.161.843.000		14.642.902.000		15.394.003.000		15.874.648.000		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	4	6	13.845.293.000	8	14.161.843.000	10	14.642.902.000	12	15.394.003.000	14	15.874.648.000		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

Kegiatan prioritas Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Nawa Karsa atau Sembilan Navigasi Perubahan yang menjadi strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Kegiatan prioritas ini merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah dan diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh perangkat daerah bersama pemangku kepentingan lainnya, dengan fokus pada pencapaian outcome dan output yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		SUB NAVIGASI										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Gresik Tuntas	Gresik Integrated Smart System	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	N/A	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	130 Unit	138 Unit Rumah	146 Unit Rumah	156 Unit Rumah	164 Unit Rumah	172 Unit Rumah
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	7,47 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	120 Unit	127 Unit	134 Unit	144 Unit	151 Unit	158 Unit
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5 Ha	5,5 Ha	6 Ha	6,5 Ha	7 Ha	7,5 Ha
2	Gresik Seger	Gresik Santri	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	N/A	23 Laporan	30 Laporan	40 Laporan	50 Laporan	60 Laporan
						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	N/A	1 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4 Lokasi	6 Lokasi	8 Lokasi	10 Lokasi	12 Lokasi	14 Lokasi
3	Gresik Mapan		Meningkatnya kualitas	Program Penataan	Penyelenggaraan Bangunan	Pembangunan, Pemanfaatan,	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA SUB NAVIGASI	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4		Pembangunan Pasar Modern Tematik	bangunan gedung	Bangunan Gedung	Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen
		Revitalisasi Akses Pintu Masuk Gresik	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		SUB NAVIGASI										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Bangunan Gedung melalui SIMBG						
						Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	N/A	23 Laporan	30 Laporan	40 Laporan	50 Laporan	60 Laporan
						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	N/A	1 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi
6			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4 Lokasi	6 Lokasi	8 Lokasi	10 Lokasi	12 Lokasi	14 Lokasi
						Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	N/A	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	130 Unit	138 Unit Rumah	146 Unit Rumah	156 Unit Rumah	164 Unit Rumah	172 Unit Rumah
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	7,47 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	120 Unit	127 Unit	134 Unit	144 Unit	151 Unit	158 Unit
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5 Ha	5,5 Ha	6 Ha	6,5 Ha	7 Ha	7,5 Ha

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA SUB NAVIGASI	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7		Gresik Kota Santri 4.0	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	N/A	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat	39 Kelompok Masyarakat
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	130 Unit	138 Unit Rumah	146 Unit Rumah	156 Unit Rumah	164 Unit Rumah	172 Unit Rumah
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	7,47 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha	7,4 Ha
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	120 Unit	127 Unit	134 Unit	144 Unit	151 Unit	158 Unit
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5 Ha	5,5 Ha	6 Ha	6,5 Ha	7 Ha	7,5 Ha
8		Memastikan Ketersediaan Air Bersih	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2 Liter/detik	2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2 Liter/Detik
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0,1 Liter/detik	0,1 Liter/detik	0,1 Liter/detik	0,1 Liter/detik	0,1 Liter/detik
						Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA SUB NAVIGASI	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	768 SR	670 SR	670 SR	670 SR	670 SR	670 SR
9	Pesona Gresik	Revitalisasi Fasilitas Kota seperti Area Pedestrian, Jalan Utama, Terminal, Alun-Alun, serta Fasilitas Publik	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	N/A	23 Laporan	30 Laporan	40 Laporan	50 Laporan	60 Laporan
						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	N/A	1 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4 Lokasi	6 Lokasi	8 Lokasi	10 Lokasi	12 Lokasi	14 Lokasi
10		Lainnya yang Mendukung Aktifitas Wisatawan dan Pentas Seni Pertunjukan	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Subkegiatan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029, sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi antara program pembangunan daerah dengan agenda prioritas nasional guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel berikut

Tabel 4. 4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasioanl 2											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir											
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2 Liter/Detik	1.266.747.337,74	2 Liter/Detik	1.304.316.094,07	2 Liter/Detik	1.352.212.382,38	2 Liter/Detik	1.419.954.311,81	2 Liter/Detik	1.463.303.741,91	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,1 Liter/Detik	50.000.000	0,1 Liter/Detik	75.000.000	0,1 Liter/Detik	100.000.000	0,1 Liter/Detik	125.000.000	0,1 Liter/Detik	150.000.000	
1.03.03.2.01.0030 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit	174.968.082,43	11 Unit	180.157.225,56	11 Unit	186.772.847,7	11 Unit	196.129.627,17	11 Unit	202.117.219,51	
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	670 SR	14.277.231.579,83	670 SR	14.677.143.680,37	670 SR	15.193.862.769,92	670 SR	15.935.041.061,02	670 SR	16.400.334.038,58	
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1 Unit	79.318.453	1 Unit	81.670.856	1 Unit	84.669.916	1 Unit	88.911.639	1 Unit	91.626.002	
Kegiatan Prioritas Utama : Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS											
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	160 M³/Hari	8.678.422.170	180 M³/Hari	8.935.804.255	200 M³/Hari	9.263.938.595	220 M³/Hari	9.728.035.630	240 M³/Hari	10.025.020.576	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,4 M³/Hari	53.972.002	0,4 M³/Hari	49.294.256	0,4 M³/Hari	49.653.149	0,4 M³/Hari	59.690.816	0,4 M³/Hari	57.832.278	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	19 Rumah Tangga	563.818.375	20 Rumah Tangga	586.818.633	21 Rumah Tangga	609.818.340	22 Rumah Tangga	632.818.915	23 Rumah Tangga	655.819.144	1.04.1.03.0.00.01.0038 - UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	355 Rumah Tangga	150.780.957,48	360 Rumah Tangga	155.252.768,3	365 Rumah Tangga	160.953.865,74	370 Rumah Tangga	169.017.184,02	375 Rumah Tangga	174.177.069,74	
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem	150 Unit	339.421.042,52	152 Unit	349.487.231,7	154 Unit	362.321.134,26	156 Unit	380.471.815,98	158 Unit	392.086.930,26	

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)											
Prioritas Nasional : Prioritas Nasioanl 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU											
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	27 Sistem Drainase Perkotaan	2.526.223.000	27 Sistem Drainase Perkotaan	2.630.803.000	27 Sistem Drainase Perkotaan	2.764.131.000	27 Sistem Drainase Perkotaan	2.952.703.000	27 Sistem Drainase Perkotaan	3.073.374.000	
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	12.029.792.000	4 Dokumen	12.395.465.000	4 Dokumen	12.861.660.000	4 Dokumen	13.521.021.000	4 Dokumen	13.942.959.000	
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dokumen	300.000.000	150 Dokumen	300.000.000	150 Dokumen	300.000.000	150 Dokumen	300.000.000	150 Dokumen	300.000.000	
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Kawasan	54.104.000	1 Kawasan	55.709.000	1 Kawasan	57.755.000	1 Kawasan	60.648.000	1 Kawasan	63.648.000	
1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	175 Orang	100.000.000	175 Orang	100.000.000	175 Orang	100.000.000	175 Orang	100.000.000	175 Orang	100.000.000	

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Layanan Informasi	10.000.000	1 Layanan Informasi	10.000.000	1 Layanan Informasi	10.000.000	1 Layanan Informasi	10.000.000	1 Layanan Informasi	10.000.000	
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	110 Paket Pekerjaan	10.000.000	112 Paket Pekerjaan	11.000.000	114 Paket Pekerjaan	12.000.000	116 Paket Pekerjaan	13.000.000	118 Paket Pekerjaan	14.000.000	
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	2 Lembaga	9.364.000	2 Lembaga	11.885.000	2 Lembaga	15.236.500	2 Lembaga	20.184.000	2 Lembaga	23.170.000	
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	50 Badan Usaha	9.364.000	50 Badan Usaha	11.885.000	50 Badan Usaha	15.236.500	50 Badan Usaha	20.184.000	50 Badan Usaha	23.170.000	
1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	12.894.600	2 Dokumen	24.182.933,34	2 Dokumen	38.574.266,66	2 Dokumen	58.928.933,34	2 Dokumen	71.954.266,66	
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	23 Laporan	150.000.000	30 Laporan	150.000.000	40 Laporan	150.000.000	50 Laporan	150.000.000	60 Laporan	150.000.000	
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi	50.000.000	2 Lokasi	100.000.000	3 Lokasi	150.000.000	4 Lokasi	200.000.000	4 Lokasi	200.000.000	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	6 Lokasi	13.845.293.000	8 Lokasi	14.161.843.000	10 Lokasi	14.642.902.000	12 Lokasi	15.394.003.000	14 Lokasi	15.874.648.000	
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.894.200	1 Dokumen	24.182.533,33	1 Dokumen	38.573.866,67	1 Dokumen	58.928.533,33	1 Dokumen	71.953.866,67	
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima	1 Dokumen	12.894.200	1 Dokumen	24.182.533,33	1 Dokumen	38.573.866,67	1 Dokumen	58.928.533,33	1 Dokumen	71.953.866,67	

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota											dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	1.04.0.00.0.00.01.0001 - UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (UPT Rusunawa)
1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	39 Kelompok Masyarakat	20.905.599,56	39 Kelompok Masyarakat	21.525.611,06	39 Kelompok Masyarakat	22.316.061,03	39 Kelompok Masyarakat	23.434.031,55	39 Kelompok Masyarakat	24.149.443,15	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	138 Unit Rumah	7.302.664.454,44	146 Unit Rumah	7.519.244.510,78	156 Unit Rumah	7.795.361.485,51	164 Unit Rumah	8.185.886.691,25	172 Unit Rumah	8.435.791.547,3	
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	38.140.481,81	2 Laporan	39.271.639,86	2 Laporan	40.713.748,36	2 Laporan	42.753.390,13	2 Laporan	44.058.597,52	
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	7,4 Ha	197.008.815,98	7,4 Ha	202.851.639,62	7,4 Ha	210.300.630,13	7,4 Ha	220.836.087,28	7,4 Ha	227.577.936,11	
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	127 Unit	6.326.829.080,55	134 Unit	6.514.468.127,54	144 Unit	6.753.688.334,95	151 Unit	7.092.028.709,72	158 Unit	7.308.539.453,23	
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5,5 Ha	301.537.567,66	6 Ha	310.480.471,14	6,5 Ha	321.881.740,02	7 Ha	338.007.090,07	7,5 Ha	348.326.022,69	

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menetapkan sejumlah subkegiatan yang mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat akses layanan dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Untuk memudahkan keterkaitan antara kebijakan nasional dan implementasi daerah, daftar subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL/PROYEK PRIORITAS NASIONAL/SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Program Strategis : Pengentasan Kemiskinan											
Proyek Prioritas : Penanggulangan Kemiskinan											
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2 Liter/Deti k	1.266.747.337,7 4	2 Liter/Deti k	1.304.316.094,0 7	2 Liter/Deti k	1.352.212.382,3 8	2 Liter/Deti k	1.419.954.311,8 1	2 Liter/Deti k	1.463.303.741,9 1	1.04.1.03.0.00. 01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,1 Liter/Deti k	50.000.000	0,1 Liter/Deti k	75.000.000	0,1 Liter/Deti k	100.000.000	0,1 Liter/Deti k	125.000.000	0,1 Liter/Deti k	150.000.000	
1.03.03.2.01.0030 - Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit	174.968.082,43	11 Unit	180.157.225,56	11 Unit	186.772.847,7	11 Unit	196.129.627,17	11 Unit	202.117.219,51	
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	670 SR	14.277.231.579, 83	670 SR	14.677.143.680, 37	670 SR	15.193.862.769, 92	670 SR	15.935.041.061, 02	670 SR	16.400.334.038, 58	
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1 Unit	79.318.453	1 Unit	81.670.856	1 Unit	84.669.916	1 Unit	88.911.639	1 Unit	91.626.002	
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	160 M³/Hari	8.678.422.170	180 M³/Hari	8.935.804.255	200 M³/Hari	9.263.938.595	220 M³/Hari	9.728.035.630	240 M³/Hari	10.025.020.576	
1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,4 M³/Hari	53.972.002	0,4 M³/Hari	49.294.256	0,4 M³/Hari	49.653.149	0,4 M³/Hari	59.690.816	0,4 M³/Hari	57.832.278	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	19 Rumah Tangga	563.818.375	20 Rumah Tangga	586.818.633	21 Rumah Tangga	609.818.340	22 Rumah Tangga	632.818.915	23 Rumah Tangga	655.819.144	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL/PROYEK PRIORITAS NASIONAL/SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	355 Rumah Tangga	150.780.957,48	360 Rumah Tangga	155.252.768,3	365 Rumah Tangga	160.953.865,74	370 Rumah Tangga	169.017.184,02	375 Rumah Tangga	174.177.069,74	1.04.1.03.0.00. 01.0038 - UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150 Unit	339.421.042,52	152 Unit	349.487.231,7	154 Unit	362.321.134,26	156 Unit	380.471.815,98	158 Unit	392.086.930,26	
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	12.894.600	2 Dokumen	24.182.933,34	2 Dokumen	38.574.266,66	2 Dokumen	58.928.933,34	2 Dokumen	71.954.266,66	1.04.1.03.0.00. 01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	23 Laporan	150.000.000	30 Laporan	150.000.000	40 Laporan	150.000.000	50 Laporan	150.000.000	60 Laporan	150.000.000	
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi	50.000.000	2 Lokasi	100.000.000	3 Lokasi	150.000.000	4 Lokasi	200.000.000	4 Lokasi	200.000.000	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	6 Lokasi	13.845.293.000	8 Lokasi	14.161.843.000	10 Lokasi	14.642.902.000	12 Lokasi	15.394.003.000	14 Lokasi	15.874.648.000	
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.894.200	1 Dokumen	24.182.533,33	1 Dokumen	38.573.866,67	1 Dokumen	58.928.533,33	1 Dokumen	71.953.866,67	
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.894.200	1 Dokumen	24.182.533,33	1 Dokumen	38.573.866,67	1 Dokumen	58.928.533,33	1 Dokumen	71.953.866,67	
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	1.04.0.00.0.00. 01.0001 - UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (UPT Rusunawa)
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	138 Unit Rumah	7.302.664.454,4 4	146 Unit Rumah	7.519.244.510,7 8	156 Unit Rumah	7.795.361.485,5 1	164 Unit Rumah	8.185.886.691,2 5	172 Unit Rumah	8.435.791.547,3	1.04.1.03.0.00. 01.0000 - Dinas Cipta Karya
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	2 Laporan	38.140.481,81	2 Laporan	39.271.639,86	2 Laporan	40.713.748,36	2 Laporan	42.753.390,13	2 Laporan	44.058.597,52	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL/PROYEK PRIORITAS NASIONAL/SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh											Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	7,4 Ha	197.008.815,98	7,4 Ha	202.851.639,62	7,4 Ha	210.300.630,13	7,4 Ha	220.836.087,28	7,4 Ha	227.577.936,11	
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	127 Unit	6.326.829.080,5 ₅	134 Unit	6.514.468.127,5 ₄	144 Unit	6.753.688.334,9 ₅	151 Unit	7.092.028.709,7 ₂	158 Unit	7.308.539.453,2 ₃	
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5,5 Ha	301.537.567,66	6 Ha	310.480.471,14	6,5 Ha	321.881.740,02	7 Ha	338.007.090,07	7,5 Ha	348.326.022,69	

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka memastikan keterpaduan arah pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menyusun subkegiatan yang secara langsung mendukung implementasi Asta Cita. Delapan agenda utama pembangunan tersebut menjadi landasan strategis bagi seluruh perangkat daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan Gresik yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Subkegiatan yang dirumuskan mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penataan kawasan permukiman, penyediaan rumah layak huni, perluasan akses air minum dan sanitasi aman, serta penguatan tata kelola pembangunan yang akuntabel. Rincian subkegiatan dukungan Asta Cita dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Asta Cita : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air											
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2 Liter/Detik	1.266.747.337,74	2 Liter/Detik	1.304.316.094,07	2 Liter/Detik	1.352.212.382,38	2 Liter/Detik	1.419.954.311,81	2 Liter/Detik	1.463.303.741,91	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,1 Liter/Detik	50.000.000	0,1 Liter/Detik	75.000.000	0,1 Liter/Detik	100.000.000	0,1 Liter/Detik	125.000.000	0,1 Liter/Detik	150.000.000	
1.03.03.2.01.0030 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit	174.968.082,43	11 Unit	180.157.225,56	11 Unit	186.772.847,7	11 Unit	196.129.627,17	11 Unit	202.117.219,51	
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	670 SR	14.277.231.579,83	670 SR	14.677.143.680,37	670 SR	15.193.862.769,92	670 SR	15.935.041.061,02	670 SR	16.400.334.038,58	
Asta Cita : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan											
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	23 Laporan	150.000.000	30 Laporan	150.000.000	40 Laporan	150.000.000	50 Laporan	150.000.000	60 Laporan	150.000.000	1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 Lokasi	50.000.000	2 Lokasi	100.000.000	3 Lokasi	150.000.000	4 Lokasi	200.000.000	4 Lokasi	200.000.000	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	6 Lokasi	13.845.293.000	8 Lokasi	14.161.843.000	10 Lokasi	14.642.902.000	12 Lokasi	15.394.003.000	14 Lokasi	15.874.648.000	
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.894.200	1 Dokumen	24.182.533,33	1 Dokumen	38.573.866,67	1 Dokumen	58.928.533,33	1 Dokumen	71.953.866,67	
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.894.200	1 Dokumen	24.182.533,33	1 Dokumen	38.573.866,67	1 Dokumen	58.928.533,33	1 Dokumen	71.953.866,67	

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	3 Unit Rumah	100.000.000	1.04.0.00.0.00.01.0001 - UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (UPT Rusunawa) 1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	642 Dokumen	1.003.182.000	
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	138 Unit Rumah	7.302.664.454,44	146 Unit Rumah	7.519.244.510,78	156 Unit Rumah	7.795.361.485,51	164 Unit Rumah	8.185.886.691,25	172 Unit Rumah	8.435.791.547,3	
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	38.140.481,81	2 Laporan	39.271.639,86	2 Laporan	40.713.748,36	2 Laporan	42.753.390,13	2 Laporan	44.058.597,52	
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	7,4 Ha	197.008.815,98	7,4 Ha	202.851.639,62	7,4 Ha	210.300.630,13	7,4 Ha	220.836.087,28	7,4 Ha	227.577.936,11	
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	127 Unit	6.326.829.080,55	134 Unit	6.514.468.127,54	144 Unit	6.753.688.334,95	151 Unit	7.092.028.709,72	158 Unit	7.308.539.453,23	
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5,5 Ha	301.537.567,66	6 Ha	310.480.471,14	6,5 Ha	321.881.740,02	7 Ha	338.007.090,07	7,5 Ha	348.326.022,69	

4.7 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai ukuran kinerja utama yang mencerminkan konsistensi perangkat daerah dalam mewujudkan visi, misi, serta arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Penetapan target dilakukan secara terukur, realistis, dan bertahap selama lima tahun ke depan sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan, pengendalian, sekaligus evaluasi kinerja. Rincian target pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2024	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	23,41	23,41	25,35	27,3	29,25	31,2	33,15	33,15
2	Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung	%	56,98	50,11	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57
3	Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani	%	0	0,06	0,06	0,1	0,11	0,15	0,15	0,06
4	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	56,96	64,13	71,3	78,48	85,65	92,83	100	100
5	Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan	%	26,05	7	7,63	8,38	9,28	10,36	11,72	11,72
6	Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman	%	0	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	11,32	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	82,4	82,4	83,28	84,82	86,36	87,74	89,26	89,26
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa	%	78,81	78,81	80,14	81,46	82,79	84,12	85	85

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Penetapan IKK dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan wajib bidang perumahan dan kawasan permukiman, air minum, sanitasi, drainase, serta penataan bangunan dan lingkungan yang menjadi kewenangan daerah. Target keberhasilan IKK diarahkan untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, khususnya terkait penurunan backlog perumahan, peningkatan cakupan sanitasi aman, penyediaan air minum layak, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas bangunan gedung, serta percepatan serah terima PSU. Rincian target capaian IKK Renstra PD selama periode 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2024	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	23,41	23,41	25,35	27,3	29,25	31,2	33,15	33,15
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	78,81	78,81	80,14	81,46	82,79	84,12	85	85
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	82,4	82,4	83,28	84,82	86,36	87,74	89,26	89,26

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 menjadi pedoman pembangunan sektor perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, penataan bangunan, dan lingkungan selama lima tahun mendatang. Renstra ini disusun untuk memastikan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian target nasional melalui keterkaitan dengan RPJMN. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas hunian layak, percepatan penanganan kawasan kumuh, perluasan akses air minum dan sanitasi aman, penataan lingkungan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM jasa konstruksi.

Pelaksanaan Renstra berlandaskan prinsip keterpaduan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan tetap mengacu pada NSPK serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Evaluasi tahunan dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran, menganalisis kendala, serta merumuskan perbaikan kebijakan. Dengan mekanisme ini, seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan diharapkan dapat tercapai secara konsisten, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.